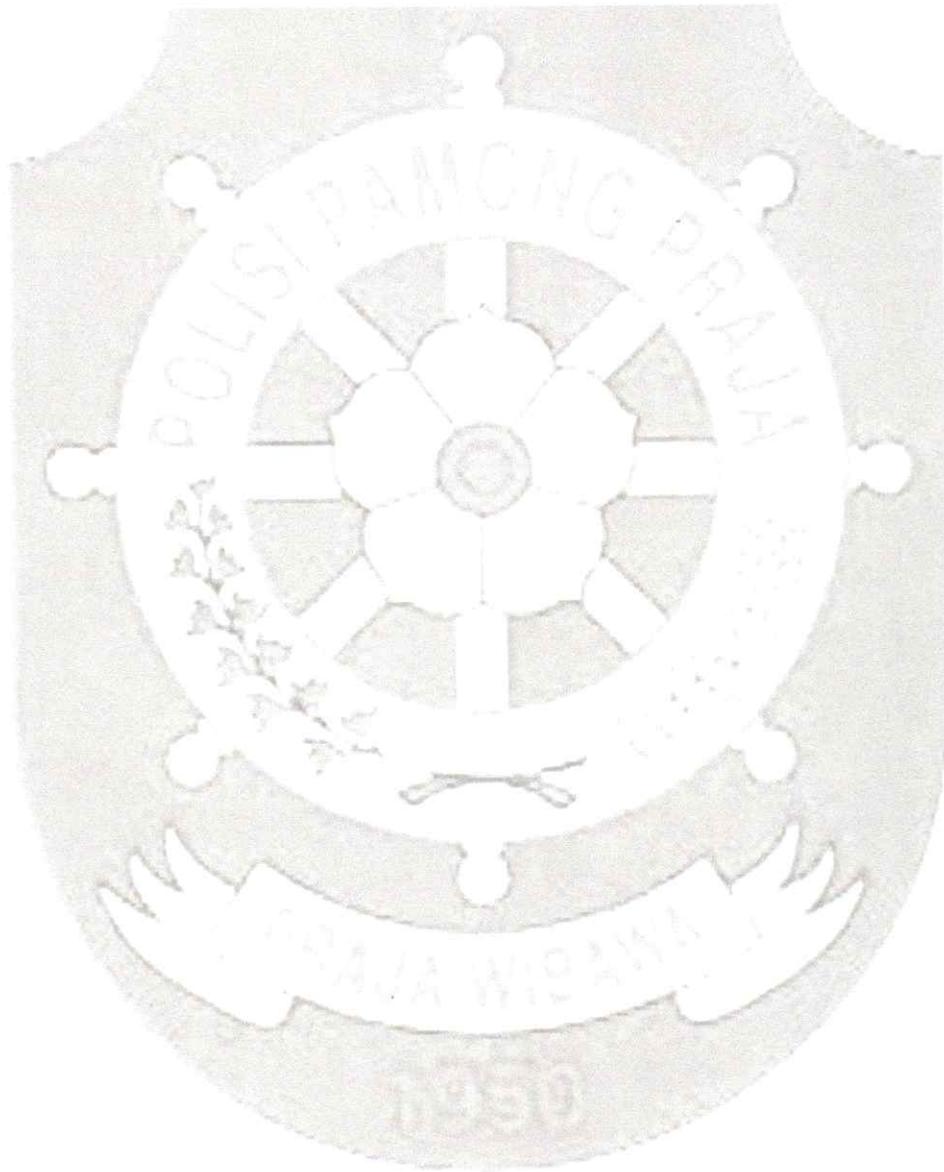


**LAPORAN KEGIATAN  
TRIWULAN I**

**KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
TRANTIBUM DAN LINMAS TINGKAT  
PROVINSI**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2025



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan I Tahun 2025 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Kewaspadaan Dini pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Kewaspadaan Dini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Dini serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Deteksi Dini mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, deteksi dan cegah dini penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

## BAB II PELAKSANAAN

### 2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan I (Januari – April) Tahun Anggaran 2025, yaitu :

a. Melakukan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Antisipasi Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Aksi Unjuk Rasa dari elemen masyarakat, berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/17/SATPOL.PP-B tanggal 6 Januari 2025, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 dalam rangka Deteksi Dini Pelaksanaan Demo Aliansi Mahasiswa BEM Seluruh Indonesia Wilayah Kalimantan Barat bertempat di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Barat;

Jumlah masyarakat yang melakukan aksi damai tersebut sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) orang.

#### **Hasil Kegiatan :**

- a) Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 pukul 14.00 s.d. 17.45 WIB bertempat di Kantor DPRD Prov. Kalbar Jl. Jendral Ahmad Ayani Kec. Pontianak Tenggara Prov. Kalbar, telah dilaksanakan Aksi Unjuk Rasa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Kalimantan Barat, mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, sebagai bentuk solidaritas untuk menunjukkan Kepedulian dan Berdialektika mengenai permasalahan Penegakkan Kebijakan. Korlap aksi Sdr. Faris.

Adapun Aliansi yang tergabung dalam aksi sebagai beriku :

- ✓ Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah Se-kalimantan Barat.
- ✓ Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PTMAI Zona II.

- ✓ Aliansi Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Negeri DEMA PTKIN.
- b) Massa Aksi diterima melaksanakan audensi di Ruang Meranti Kantor DPRD Prov. Kalbar, oleh:
- ✓ Ketua DPRD Prov. Kalbar Bpk. Aloysius, S.H., M.Si. (Fraksi PDIP).
  - ✓ Wakil Ketua DPRD Prov. Kalbar Bpk. Prabasa Anantatur, M.H. (Fraksi Golkar).
  - ✓ Ketua Komisi III Bpk. H. Syarif Amin Muhammad, S.Ak. (Fraksi Nasdem).
  - ✓ Anggota Komisi III DPRD Prov. Kalbar Bpk. Kasdi, S.I.P., S.H (Fraksi PDIP).
- c) Presiden BEM UMP Sdr. Muhammad Sherkhan menyampaikan orasi :
- ✓ Kami menolak kenaikan PPN 12% karena tidak ada kajian hukum, melalui kementerian Keuangan sehingga dianggap peraturan abal-abal. Perlu ada nya revisi Perpu Persidangan agar mendapatkan jaminan hukum yang konkrit.
  - ✓ Reformasi sistem aparat Kepolisian Republik Indonesia, perlunya ada pendidikan moralitas.
  - ✓ Menolak keras Pemilihan Kepala Daerah, dipilih langsung oleh DPRD.
- d) Tanggapan Ketua DPRD Prov. Kalbar Bpk. Aloysius, S.H., M.Si. (Fraksi PDIP) :
- ✓ Saya mengapresiasi atas reaksi mahasiswa perjuangkan hak-hak masyarakat mengenai kenaikan pajak, dimana masyarakat merasa terbebani. Kami DPRD Prov. Kalbar berterima kasih kepada mahasiswa telah mewakili aspirasi masyarakat, kami di Komisi III akan menyampaikan kepada pemerintah pusat terkait aspirasi ini.
  - ✓ Kita akan berupaya yang terbaik untuk rakyat DPRD Provinsi hanya mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, kita akan berupaya menyampaikan aspirasi mahasiswa hari ini.
  - ✓ Kami menyambut baik atas partisipasi mahasiswa yang mau berjuang bersama rakyat, kita memahami apa yang menjadi tuntutan kita sebagai warga negara Indonesia.

- e) Tanggapan Wakil Ketua DPRD Prov. Kalbar Bpk. Prabasa Anantatur, M.H. (Fraksi Golkar):
- ✓ Terkait apa yang disampaikan oleh mahasiswa ada 3 poin yg menjadi aspirasi dalam tema diskusi kita pada hari ini, perlu saya sampaikan bahwa masalah kenaikan PPN 12%, Reformasi Kepolisian, dan pemilihan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.
  - ✓ Permasalahan PPN 12% dalam UU No 7 Tahun 2021, dimana ini adalah program Presiden Bpk. Joko Widodo yang disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perlu kita ketahui sebelum kenaikan kita sudah menjalankan PPN 11% dalam hal itu kami akan menyampaikan apresiasi kepada DPR RI sesuai Fraksi masing-masing.
  - ✓ Terkait wacana pemilihan Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD tentu nya ini akan direvisi ulang lagi oleh DPR RI.
  - ✓ Terkait Reformasi Kepolisian harus dilakukan, perlunya ada kajian-kajian khusus untuk membentuk moralitas.
- f) Pukul 17.35 WIB Korlap Massa Aksi yang didampingi Ketua DPRD Prov. Kalbar membacakan Pernyataan Sikap dan Tuntutan BEM SI sebagai berikut :
- ✓ Menuntut Prabowo untuk segera mengeluarkan Perpu yang mengatur secara tegas dan jelas terkait PPN 11% dan 12%.
  - ✓ Menolak keras wacana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.
  - ✓ Menuntut DPR dan Presiden untuk mereformasi Instansi Polri.
- g) Pukul 17.45 WIB Massa Aksi membubarkan diri dengan tertib.
- h) Selama kegiatan pada Aksi BEM Seluruh Indonesia wilayah Kalimantan Barat di Halaman Gedung DPRD Kalimantan Barat. tidak ada ditemukan potensi gangguan trantibun Selama Kegiatan Tersebut.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/152/SATPOL.PP-B tanggal 18 Februari 2025, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 dalam rangka Deteksi Dini Pelaksanaan Pada Aksi Demo Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas dan Aliansi Mahasiswa BEM SI bertempat di Kantor DPRD Provinsi Kalbar;

Jumlah masyarakat yang melakukan aksi damai tersebut sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) orang.

**Hasil Kegiatan :**

- a) Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Polda Kalbar, Polresta Pontianak, Koramil Selatan dan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan antisipasi potensi gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas dan Aliansi Mahasiswa BEM di Halaman Gedung DPRD Provinsi Kalbar.
- b) Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 pukul 08.00 s.d. 17.45 WIB bertempat di Kantor DPRD Prov. Kalbar Jl. Jendral Ahmad Ayani Kec. Pontianak Tenggara Prov. Kalbar, telah dilaksanakan Aksi Unjuk Rasa oleh Aksi Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas dan Aliansi Mahasiswa BEM SI.
- c) Aksi Unjuk Rasa Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjung Pura bersama Solidaritas Mahasiswa Dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar), aksi bertajuk "Pontianak Menggugat". Dengan Korlap Sdr. Agim Nastia.
- d) Alat Peraga antara lain : Spanduk bertuliskan : "Pontianak Menggugat" "Tolak Efisiensi Cabut Inpres No. 1 Tahun 2025 #Ok Gass, Menuju Indonesia Emas", "Tolak Efisiensi, Indonesia Cemas", "Kabinet Pincang", "Indonesia Gelap", "Orang Miskin Dilarang Sekolah !!! #Efisiensi" 3 (tiga) buah Bendera : Bendera Merah Putih, Bendera BEM SI Provinsi Kalbar dan Bendera Solmadapar serta Megaphone.
- e) Hal-hal yg dilaporkan sebagai berikut :
  - ✓ Massa aksi tiba di Depan Kantor DPRD Kalimantan Barat dilanjutkan pemasangan Spanduk di Pagar Kantor DPRD Kalimantan Barat dan Orasi dan membakar ban di Trotoar Depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
  - ✓ Anggota DPRD Prov. Kalbar yaitu Bp. Sy Amin Muhammad dan Bp. Zulfidar Zainal Mochtar menemui massa unras dan menyatakan bahwa DPRD Prov Kalbar melalui Komisi V DPR Ri juga meminta seharusnya Kalbar tidak dipotong infrastrukturnya karena infrastruktur di Kalbar sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan dan aspirasi

mahasiswa akan dilanjutkan ke pimpinan dan diteruskan di komisi DPR RI.

- ✓ Aksi Mahasiswa Di Depan Gedung Dprd Prov Kalbar, Menuntut:
  - 1) Mendesak Prabowo Subianto Untuk Segera Mencabut Impres Nomor 1 Tahun 2025
  - 2) Menuntut Pemerintah Menghapus Program Mkn Bergizi Gratis. Dan Perbesar Anggaran Pendidikan Dan Tolak Danantara.
  - 3) Menuntut Prabowo Subianto Mereformasi Tni Polri.
  - 4) Menuntut Prabowo Subianto Untuk Mengefisienkan Kabinet Obesitas.
  - 5) Menuntut Pemerintah Untuk Segera Mengesahkan Ruu Perampasan Asset.
  - 6) Menuntut Pemerintah Untuk Segera Mengesahkan Ruu Masyarakat Adat.
  - 7) Menolak 8 Psn Yang Ada Di Kalbar (Kawasan Industri Ketapang, Pt Whw Aluminar Revenery, Kawasan Industri Landak, Pelabuhan Internasional Kijing, Smelter Pt Bai, Kawasan Industri Alumina Teba, Kawasan Industri Kawasan Penebang, Pt Sejahtera Mandiri
  - 8) Menuntut Pemprov Kalbar Untuk Segera Menyelesaikan Dan Juga Membenahi Desa Tertinggal Di Kalimantan Barat.
  - 9) Menolak Programnya Swasambada Pangan Di Kalbar
  - 10).Menuntut Pemprov Kalbar, Menindak Tegas Deforestasi Dan Perampasan Lahan Adat Yang Dilakukan Oleh Pt Mayawana Persada.
  - 11) Menuntut Pemprov Kalbar Bertanggung Jawab Dan Bertindak Tegas Terhadap Bencana Sosial (Phk 200 Pekerja, Darurat Pengusiran 400 Warga, Dan Putus Sekolah 800 Anak) Yang Di Lakukan Oleh Pt Duta Palma Milik Koruptor Surya Darmaji.
  - 12) Menuntut Pemprov Kalbar Untuk Segera Menertibkan Aktivitas Peti Di Kabupaten Ketapang
- f) Pada Kegiatan Aksi Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas dan Aliansi Mahasiswa BEM di Halaman Gedung DPRD Kalimantan Barat tidak ada ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan tersebut.

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/266/SATPOL.PP-B tanggal 20 Februari 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 dalam rangka Deteksi Dini Pelaksanaan Pada Aksi Demo Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak bertempat di Kantor DPRD Provinsi Kalbar;
- Jumlah masyarakat yang melakukan aksi damai tersebut sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) orang.

**Hasil Kegiatan :**

- a) Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 pukul 14.30 WIB bertempat di Kantor DPRD Prov. Kalbar Jl. Jenderal Ahmad Yani Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara Prov. Kalbar, telah dilaksanakan Aksi Unjuk Rasa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Aliansi Masyarakat Universitas Tanjungpura dengan tema "Indonesia Gelap". Sebagai Korlap Aksi Sdr. Khairul Karudi.
- b) Alat peraga yang digunakan: Bendera Almamater, Megaphone dan Spanduk dengan tulisan:
- ✓ Isi perut elit isi otak sulit.
  - ✓ Kami butuh jaminan pendidikan bukan makan.
  - ✓ Habis gelap terbitlah perlawanan.
  - ✓ Makan sehat pendidikan cacat.
  - ✓ Kabinet gendut pendidikan surut.
  - ✓ Mitigasi belum tuntas anggaran 50% dipangkas.
  - ✓ Hujan kebanjiran, panas kebakaran.
  - ✓ Efisiensikan pejabat bukan rakyat.
  - ✓ Indonesia Gelap.
  - ✓ Jalan rusak rakyat di palak.
  - ✓ Viral dulu Presiden labil.
- c) Poster dengan tulisan: Pemberian izin tambang yang serampangan yang beresiko pada kerusakan lingkungan.
- d) Massa tiba di Kantor DPRD Provinsi Kalbar dan melaksanakan orasi secara bergantian kemudian Massa Aksi diterima di Ruang Rapat Meranti oleh:

- ✓ Komisi III DPRD Prov Kalbar, Sy. Amin Muhammad, S.Ak (Fraksi Nasdem)
- ✓ Komisi V DPRD Prov Kalbar Bpk. Zulfydar Zaidar Mochtar, S.E., M.M. (Fraksi PAN).
- ✓ Anggota Komisi IV DPRD Prov. Kalbar Bpk. Mulyadi Tawik, S.E., M.E. (Fraksi PKB).

e) Adapun penyampaian dalam audensi:

Perwakilan Mahasiswa:

- ✓ Kebijakan Presiden yang sangat mencekik masyarakat terkait Efisien anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sosial.
- ✓ Permasalahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di bidang pendidikan berdampak efisiensi anggaran.
- ✓ Infrastruktur pembangunan sekolah belum memadai.
- ✓ Tuntutan BEM dan Aliansi Masyarakat Universitas Tanjungpura.
- ✓ Agar Pemerintah Daerah menuntaskan bencana alam di Kalbar.
- ✓ Menolak efisien anggaran yang mempersulit rakyat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sosial.
- ✓ Menuntut pemerintah daerah agar merealisasikan infrastruktur yang memadai.

Tanggapan Wakil Ketua DPRD Prov Kalbar Bpk. Sy. Amin Muhammad, S.Ak. (Fraksi Nasdem) :

- ✓ Tantangan pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat 2025 terutama dari sisi anggaran.
- ✓ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat saat ini tidak terlalu signifikan untuk dianggarkan ke Infrastruktur jalan.
- ✓ DPRD sudah menuntaskan Pansus menjadi hak masyarakat di Kab. Kapuas Hulu.
- ✓ Perusahaan yang berdiri di Kalbar diwajibkan pembayaran pajak untuk mendukung APBD.

Tanggapan Anggota Komisi IV DPRD Prov. Kalbar Bpk. Mulyadi Tawik, S.E., M.E. (Fraksi PKB) :

- ✓ Agar mahasiswa memahami dan bersabar ini kebijakan baru berjalan, dan akan dikaji kedepan apabila kebijakan ini merugikan rakyat.
  - ✓ Aspirasi masyarakat adalah bagian penting bagi Fraksi untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing bidang.
- f) Korlap Massa Aksi menyerahkan Press Release kepada Komisi III DPRD Prov Kalbar Bpk. Sy. Amin Muhammad, S.Ak (Fraksi Nasdem) dan Massa Aksi membubarkan diri dengan tertib. Selama kegiatan berjalan aman dan lancar.
4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/271/SATPOL.PP-B tanggal 20 Februari 2025, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 dalam rangka Deteksi Dini Pelaksanaan Pada Aksi Demo Himpunan Mahasiswa Indonesia Kalbar bertempat di Kantor DPRD Provinsi Kalbar;
- Jumlah masyarakat yang melakukan aksi damai tersebut sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) orang.

**Hasil Kegiatan :**

- a) Pada hari jum'at tanggal 21 Februari 2025 pukul 13.00 s.d. 17.45 WIB bertempat di Kantor DPRD Prov. Kalbar Jl. Jendral Ahmad Ayani Kec. Pontianak Tenggara Prov. Kalbar, telah dilaksanakan Pada Kegiatan Aksi Aliansi HMI Provinsi Kalimantan Barat di Halaman Gedung DPRD Kalimantan Barat.
- b) Indonesia semakin gelap dengan kebijakan pemerintah yang sembrano tidak melihat se kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Han ini kami Himpunan Mahasiswa Islam Se Kalimantan Barat serta lapisan masyarakat yang melawan, turun kejalan melawan kemal kebijakan kejam dari pemerintah terhadap rakyatnya, dengan beberapa isu yang di tave dar Bingkup nasional dan juga regional.
- c) Inpres No 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo telah membuka kehancuran yang akan menjadikan indonesia emas tahun 2025 hanayalah menjadi sebuah angan-angan, dengan diksi yang

diberikan EFISIENSI ANGGARAN. Tetapi realitas dan dan pemangkasan secara brutal terkait pendidikan, pemerintah kali ini telah terang-berangan menyampaikan, tidak hanya dengan perkataan tetapi juga mengemukakan bahwasanya pendidikan hanyalah sebuah pendukung bukan prioritas. Tidak hanya tu juga, Kesehatan yang dimpikan bagi seluruh rakyat hanya dijadikan pendukung dalam perjalanan pemerintahannya.

- d) RUU Perampasan Aset yang sampai detik ini belum di tindak lanjuti oleh DPR RI, yang mana telah kita ketahui bersama bahwa RUU ini merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam menutup celah impunitas bagi koruptor dan pelaku tindak pidana akononi annja dengan ini mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai langkah konkret dalam memperkuat spava pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya di Indonesia. Landamya proses pengesahan: RUU ini mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam menindak pelaku kejahatan yang telah merugikan keuangan negara dan masyarakat luas.
- e) Beranjak ke isu regional, Kalimantan sebagai salah satu laboratorium hutan terbesar Indonesia dengan kekayaan alamnya yang luar biasa kini menghadapi ancaman setus. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintah justru menggundal hutan dan mencemari sungal kita secara masif. PSN yang ditetapkan di Kalimantan Sant, ancaman deforestasi besar-besaran semakin nyata, membawa dampak ekologis yang buk lagi masyarakat setempat.
- f) Dalam kajian kami yang lebih komprehensif, kami menyadari bahwa masih terdapat daerah daerah tertinggal di Kalmantan Barat. Beberapa wilayah bahkan dapat dikategorikan sebe lesa yang tidak layak huni akibat infrastruktur yang buruk-jalan yang rusak parsih, ketiadaan strik, serta minimnya akses air bersih.maka dengan paparan permasalahan yang banyak dan bahkan lebih dari apa yang kami tull mi, kami berdiri tegak di depan gedung DPRD Provinsi Kalbar Menuntut :

- ✓ Menuntut Gubernur terlantik untuk menyelesaikan segala di KAL-BAR permasalahan yang ada.
  - ✓ Menuntut PEMPROV KAL-BAR untuk segera menyelesaikan dan juga membenahi desa tertinggal.
  - ✓ Evaluasi PSN yang ada di KAL-BAR, Misalnya, kawasan industri ketapang, PT. WHW Alumia Revener dan lain-lain.
  - ✓ Evaluasi pelaksanaan Swasembada Pangan di Kalbar
  - ✓ Mengkaji ulang kebijakan pemerintah yang kontroversial.
  - ✓ Mengkaji ulang INPRES Nomor 1 Tahun 2025.
  - ✓ Menuntut DPR RI untuk mengkaji ulang Revisi UU TNI Polri dan Kejaksaan.
  - ✓ Mengkaji ulang UU Minerba.
  - ✓ Manuntut Presiden untuk mengefesiesikan kabinet obesitas
  - ✓ Menuntut Pemprov Kalimantan Barat untuk segera mengusut penyelewengan BBM bersubsidi di Kalbar.
  - ✓ Menurut DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset
  - ✓ Menurut Pemprov Kalimantan Barat Untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM di Kalbar
- g) Pada Kegiatan Aksi Aliansi HMI Provinsi Kalimantan Barat di Halaman Gedung DPRD Kalimantan Barat tidak ada ditemukan potensi gangguan trantibun Selama Kegiatan Tersebut.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/340/SATPOL.PP-B tanggal 5 Maret 2025, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 dalam rangka Deteksi Dini Pelaksanaan Pada Aksi Demo Komite Sekolah SMA Negeri 1 Pontianak bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat;
- Jumlah masyarakat yang melakukan aksi damai tersebut sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) orang.

### Hasil Kegiatan :

- a) Permohonan pada Kegiatan Audiensi dengan Pak Gubernur Kalbar Kamis 6 Maret 2025 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (oleh : Ibrahim, M.Pd. Perwakilan MKKS SMA)
- b) Paparan terkait PERMENDIKBUDRISTEK NO 65 tahun 2022, Pasal 39 dan 40 halaman 14 dan 15 tentang dibolehkannya membayar honorer di sekolah Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang pengaturan pembayaran honor maks 50% dari Dana BOS thn, dengan beberapa syarat:
  - ✓ Syarat Bagi Guru : Bukan ASN, Tercatat di Dapodik, Memiliki NUPTK dan belum menerima tunjangan profesi
  - ✓ Syarat Bagi Tenaga Kependidikan : Bukan ASN dan SK Penugasan Kepala Sekolah Tidak semua guru honor Non ASN dapat terakomodir di BOS karena syarat tadi. Sehingga harus ada alternatif sumber dana selain BOS yaitu PBPP seperti tahun-tahun sebelumnya.
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal Pasal 65 dan 66 halaman 29 tentang ASN. Bahwa Instansi Pemerintah tidak boleh mengangkat tenaga Non ASN. Undang-Undang ini menggugurkan Permendikbudristek Nomor 65 Tahun 2022 tersebut. Sehingga honor non ASN harus diberikan alternatif lain, harapan kami PBP lah solusinya. Tugas dan fungsi guru sebagai tenaga profesional maupun fungsional. Sangatlah berbeda dengan tugas dan fungsi ASN struktural /lainnya Tugas utama kami membimbing/melatih peserta didik. Membangun Karakter mereka. Tidak ada tenaga/mesin lain yg dapat menggantikan tugas Guru. Karena guru dalam membimbing/melatih peserta didik perlu disertai dengan Guru ahlak/budi pekerti yang baik/hati yg mulia.
- d) Permohonan kami para kepala sekolah agar peraturan dana PBP untuk dikembalikan seperti semula sesuai dengan hakikat awal PBP itu merupakan dana bantu dari pemerintah yang diserahkan kepada orang tuapeserta didik yang kemudian diamanahkan kepada sekolah untuk membiayai segala kebutuhan yang tidak dibiayai oleh BOS.

- e) Tugas tambahan yang selama ini dihargai, dibiayai tapi dengan UU tersebut dilarang. mohon dikembalikan juga seperti semula karena pada dasarnya tugas tambahan itu memang bukan tupoksi guru misal: wali kelas s.Koordinator dapodik, Panitia PPDB dan sebagainya dan juga selama ini juga dibayar seadanya misal wali kelas, padahal kerja wali kelas siang malam, untuk menghandle semua persoalan siswa sebanyak minimal 36.
- f) Tugas Guru Itu Mulia  
Tapi tidak semua guru mendapat honor yg layak, hanya karena aturan yang sampai hari ini belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan dan kebahagiaan gurus.  
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat Bapak Drs. H. RIA NORSAN, M.M., M.H. Yang dengan ketulusan dan kerendahan hati sudah mau menerima kehadiran kami, mendengar suara guru Kalimantan Barat pak. Doa Kami semoga bapak sekeluarga beserta jajarannya dirahmati dan diberkahi Allah SWT dalam menjabat Amanah sebagai Gubernur Kalimantan Barat, Amin.
- g) Selama Kegiatan Pada Aksi Demo Komite Sma Negeri 1 Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tidak ada ditemukan potensi gangguan tranribun Selama Kegiatan Tersebut.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/371/SATPOL.PP-B tanggal 10 Maret 2025, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 dalam rangka Deteksi Dini Pelaksanaan Pada Penyampaian Aspirasi dan Audiensi Oleh Persatuan Tenaga Kontrak Kalimantan Barat (PTKKB) bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat;
- Jumlah masyarakat yang melakukan aksi damai tersebut sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) orang.

### Hasil Kegiatan :

- a) Penyampaian perwakilan Audensi dari Bpk Fitri Afriadi sebagai koordinator.
- ✓ Terbitlah surat dari terkait dengan penundaan jadwal pengangkatan CPNS dan P3K di intinya itu sebenarnya jadi intinya kita di sini bang kawan ini semuanya meminta lah melalui Provinsi Kalimantan Barat untuk mengkaji ulang terkait dengan surat itu dan keputusan rapat RTV itu mudah diulang bahwa jangan ada penundaan kalau bisa.
  - ✓ sesuaikan dengan jadwal yang ada nah banyak pertimbangan tadi juga dengan banyak yang P3K ini yang rata-rata usia pensiun semua gitu kalau kemarin dia tidak sampai ada yang cuman sampai Februari aja sudah pensiun gitu dan itu pertimbangannya terus ya karena proses kita.
  - ✓ Untuk pemberkasan sudah semua jadi tinggal penerbitan ini PNI P3K sama eee pengangkatan saja jadi kita minta itu untuk ditinjau kembali dan ditunda lah gitu jadwal dan tetap kembali ke jadwal awal pengangkatan CPNS SMP 3K di bulan kemarin atau April ini gitu jadi informasinya honorer juga salah satu.
  - ✓ Karena rata-rata CP3K Provinsi Kalimantan Barat ini semuanya itu dari honor honor Provinsi Kalimantan Barat yang diberi kesempatan sama ini untuk siakad united Jakarta tapi semuanya melalui tahap kita pendaftaran tips dan lain-lain kita pertimbangannya lah apakah.
  - ✓ Untuk menyampaikan prestasi kita ke PKN dan alhamdulillah respon baik dari gubernur ketika bahwa dengan dikeluarkan surat gubernur tadi yang disampaikan ke DPR RI dan mudah-mudahan dari hasil yang baik.
- b) Tanggapan Sekda Prov. Kalbar Bpk. dr. Harisson, M.Kes.
- ✓ Saya mewakili Gubernur sangat memahami apa yang menjadi ke Gundahan hati dari para CPNS dan CP3K ya jadi sudah diungkapkan kembali bahwa sudah mengeluarkan mungkin biaya besar untuk pendaftaran dan lain-lain.

- ✓ Mungkin ada yang sudah meninggalkan CPNS mungkin ada yang sudah meninggal pekerjaannya yang sudah berhenti dia tahunya belum diangkat ya nah ini ya termasuk ada juga yang mengeluhkan soal bagaimana nih usia kami sudah apa.
  - ✓ Menjadi keprihatinan dari Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ya termasuk saya sebagai sekretaris Daerah kita sudah menerima surat ini kemarin dan sebenarnya pak gubernur langsung merespon ya langsung merespon dan memerintahkan Bapak Wakil Gubernur dan kepala BKD untuk ke Jakarta hari ini.
  - ✓ Pertama : untuk menjawab soal yang guru kemarin masalah guru honorer kemarin kemudian soal P3K ini ya nah pak gubernur bukan main sebenarnya ya kita terima kasih kepada pak gubernur dan pak wakil gubernur jadi responnya begitu cepat kalau apa namanya yang biasanya kalau orang yang lambat kan demo dulu dari ibu-ibu baru ada respon lalu ini Sebelum demo kami ini bangunan sudah langsung merespon langsung dikirim untuk itu sekali lagi kita ucapan terima kasih.Ke dua minta dibuatkan surat untuk komisi II DPR RI dan apa namanya Menpan RB ya semalam saya sudah parah suratnya dan sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur secara manual karena pagi-pagi ini harus dibawa.
  - ✓ Ridwan 1 elektronik ya satu lagi yang manual sudah dibawa saya bacakan ya Bapak Ibu sekalian saya bacakan Gubernur Kalbar Tahun 2025 hari ini nomor 800.1.2.2/XX/BKD sifat segera lampiran tidak ada hal aksi CPNS dan CP3K menolak penyesuaian TMT pengangkatan sebagai CPNS dan CP3K formasi 2002 komisi 2 DPR RI 2 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Hubungan dengan rencana aksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CP3K) yang sudah dinyatakan lulus pada seleksi Tahun 2024.
- c) Adapun yang menjadi permintaan peserta aksi adalah agar komisi II DPR RI dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi bersedia meninjau kembali dan merubah jadwal TMT pengangkatan CPNS dan P3K secepatnya tanggal 1 Oktober 2025

untuk yang lulus CPNS dan tidak pada tanggal 1 Maret 2026 untuk yang lulus P3K namun dilaksanakan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Tiga sehubungan dengan hal tersebut pada angka 2 mohon kebijakan ketua komisi 2 DPR RI dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mengabulkan permintaan CPNS dan cp3k Provinsi Kalimantan Barat. Atas perhatian ketua komisi 2 DPR RI dan ibu menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi beroperasi diucapkan terima kasih gubernur Kalimantan Barat.

- d) Selama Pada Kegiatan Penyampaian Aspirasi Dan Audensi Oleh Persatuan Tenaga Kontrak Kalimantan Barat tidak ada ditemukan potensi gangguan trantibun Selama Kegiatan Tersebut.
- b. Melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam rangka Deteksi Dini terkait Kegiatan Keagamaan bertempat di Kota Pontianak, berdasarkan :
- 1) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/11/SATPOL.PP tanggal 3 Januari 2025 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2025 terkait Kegiatan Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.
  - 2) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/81/SATPOL.PP tanggal 17 Januari 2025 yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025 terkait Kegiatan Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul Habib Muhammad Bin Abdullah Al Muthahar Ke- 113 bertempat di Mesjid Raya Mujahidin Pontianak.
  - 3) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/113/SATPOL.PP tanggal 22 Januari 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, 28-29 Januari 2025 terkait Kegiatan Perayaan Tahun Baru Imlek 2576 bertempat di Kabupaten Kubu Raya.
  - 4) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/114/SATPOL.PP tanggal 22 Januari 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, 28-29 Januari 2025 terkait Kegiatan Perayaan Tahun Baru Imlek 2576 bertempat di Kabupaten Mempawah.

- 5) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/209/SATPOL.PP tanggal 12 Februari 2025 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Februari 2025 terkait Kegiatan Parade Naga Bersinar Festival Cap Go Meh 2576 Tahun 2025 bertempat di Kota Pontianak.
- 6) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/479/SATPOL.Minggu-Selasa, 30 Maret – 1 April 2025 terkait Kegiatan Malam Takbiran dan Open House Hari Raya Idul Fitri 1446 H bertempat di Kota Pontianak.

**Hasil Kegiatan :**

- a) Sasaran kegiatan yaitu masyarakat yang melakukan ibadah pada perayaan hari keagamaan di tempat ibadah masing-masing diantaranya pada Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Tahun Baru Imlek 2576 dan Hari Raya Idul Fitri;
  - b) Kegiatan deteksi dini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka perayaan Hari Raya keagamaan untuk mengantisipasi potensi gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat.
  - c) Hingga kegiatan selesai, tidak ditemukan adanya potensi terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan pada Kegiatan Tahun Baru Imlek 2576 Tahun 2025 bertempat di Kota Singkawang, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 000.1.2.3 / 120 / 2025/ SATPOL.PP tanggal 23 Januari 2025

**Hasil Kegiatan :**

- 1) Perayaan Tahun Baru Imlek 2576 di Kota Singkawang dimulai dengan kegiatan Pentas Seni Budaya & Expo yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari 2025 – 13 Februari 2025 bertempat di Stadion Kridasana Kota Singkawang.
- 2) Puncak kegiatan yang perlu diantisipasi pada Festival Cap Go Meh pada tanggal 12 Februari 2025.

- 3) Dari pantauan dilapangan, terjadinya kerumunan Masyarakat yang sengaja menunggu perayaan tahun baru imlek karena setiap tahun Masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang menjelang pukul 00.00 WIB akan menyalakan petasan dan kembang api yang sudah menjadi tradisi setiap tahun pada malam tahun baru imlek.
  - 4) Terlihat di setiap klenteng-klenteng, Masyarakat Tionghoa melakukan sembahyang dan berdoa dengan menyalakan dupa, lilin-lilin sebagai ucap Syukur menyambut datangnya Tahun Baru Imlek
  - 5) Hingga kegiatan selesai, tidak terdapat adanya gangguan dan hambatan yang dapat berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. Melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam rangka Deteksi Dini selama Bulan Ramadhan bertempat di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah berdasarkan :
- 1) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/324/SATPOL.PP tanggal 28 Februari 2025 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2025 terkait Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Terhadap Kenakalan Remaja bertempat di Kota Pontianak.
  - 2) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/363/SATPOL.PP tanggal 7 Maret 2025 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2025 terkait Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum selama bulan Ramadhan bertempat di Kota Pontianak.
  - 3) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/362/SATPOL.PP tanggal 7 Maret 2025 yang dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 8-9 Maret 2025 terkait Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum selama bulan Ramadhan bertempat di Kota Pontianak.
  - 4) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/378/SATPOL.PP tanggal 11 Maret 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 terkait Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum selama bulan Ramadhan bertempat di Kota Pontianak.

- 5) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/385/SATPOL.PP tanggal 12 Maret 2025 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 terkait Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum selama bulan Ramadhan bertempat di Kota Pontianak.
- 6) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/394/SATPOL.PP tanggal 13 Maret 2025 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 terkait Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum selama bulan Ramadhan bertempat di Kota Pontianak.
- 7) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/395/SATPOL.PP tanggal 13 Maret 2025 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2025 terkait Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum selama bulan Ramadhan bertempat di Kota Pontianak.
- 8) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/403/SATPOL.PP tanggal 14 Maret 2025 yang dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 15-16 Maret 2025 terkait Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum terkait kenakalan remaja bertempat di Kota Pontianak.
- 9) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/416/SATPOL.PP tanggal 17 Maret 2025 yang dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, tanggal 17-18 Maret 2025 terkait Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum selama bulan Ramadhan bertempat di Kota Pontianak.
- 10) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/431/SATPOL.PP tanggal 19 Maret 2025 yang dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, tanggal 19-20 Maret 2025 terkait Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum selama bulan Ramadhan bertempat di Kota Pontianak.

- 11) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/453/SATPOL.PP tanggal 24 Maret 2025 yang dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, tanggal 24-25 Maret 2025 terkait Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum selama bulan Ramadhan bertempat di Kota Pontianak.
- 12) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/457/SATPOL.PP tanggal 24 Maret 2025 yang dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, tanggal 26-27 Maret 2025 terkait Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum selama bulan Ramadhan bertempat di Kota Pontianak.

**Hasil Kegiatan :**

- a) Kegiatan Deteksi Dini potensi gangguan Trantibum dan Linmas yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan Tahun 2025, diantaranya :
  - ✓ Acara Buka Puasa Bersama dihadiri oleh Forkopimda, Anggota DPR RI Dapil Kalbar dan Instansi Vertikal bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat;
  - ✓ Acara Buka Puasa Bersama dan Peringatan Nuzulul Qur'an 1446 H di Masjid Raya Mujahidin Pontianak;
  - ✓ Acara Buka Puasa Bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat bersama PWRI bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat;
  - ✓ Acara Buka Puasa Bersama Gubernur Kalbar dengan 500 Guru Ngaji, Pejuang Nafkah dan Mualaf di Pondok Pesantren Ismuhu Yahya Kabupaten Kubu Raya;
  - ✓ Acara Teraweh bersama masyarakat, Jemaah Sajadah Fajar dan Gubernur Kalimantan Barat bertempat di Pendopo Kalimantan Barat;
  - ✓ Kegiatan Gubernur Kalimantan Barat pada acara Festival Ramadhan 2025 di Aula Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat;
  - ✓ Kegiatan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat pada acara Gerakan Pangan Murah di Dinas Ketahanan Pangan Prov Kalbar;
  - ✓ Keg Patroli dan Pengecekan Pos Pengamanan Pada Malam Takbiran Oleh Gub Kalbar Bersama Kapolda dan Forkopimda Kalbar bertempat di Taman Digulis Untan;

- ✓ Kegiatan patroli Trantibum di Kota Pontianak, ditemukan adanya perkumpulan remaja mengadakan lomba lari sprint di kawasan pasar kapuas tepatnya di samping kantor Pusat Bank Kalbar atau Depan Hotel Wijaya Kusuma.
  - b) Selama pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan adanya potensi gangguan Trantibum, namun yang menjadi perhatian yaitu adanya kerumunan remaja yang dapat meresahkan masyarakat sekitar.
- 13) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/458/SATPOL.PP tanggal 25 Maret 2025 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2025 terkait Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Mudik Gratis Khatulistiwa bertempat di Kota Pontianak.

**Hasil Kegiatan :**

- a) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan Deteksi Dini potensi gangguan Trantibum pada kegiatan Mudik Gratis Khatulistiwa 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil memberangkatkan ribuan pemudik ke 12 rute tujuan di wilayah Kalbar dan pelepasan secara resmi dilakukan oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kantor Gubernur Kalbar.
- b) Pemprov Kalbar menyiapkan 1151 kursi dan sebanyak 1117 pemudik berhasil diberangkatkan pada Mudik Gratis kali ini. Hanya tersisa 34 seat yang tidak terisi. Program Mudik Gratis ini merupakan bagian dari program 100 hari Gubernur Kalbar yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Mudik Gratis ini juga memberikan kelonggaran kepada pemudik untuk mendapatkan pelayanan langsung dari pemerintah.
- c) Kegiatan pemberangkatan Mudi Gratis Khatulistiwa Tahun 2025 dilaksanakan dengan aman dan tertib tanpa ada gangguan Trantibum.

- 14) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/478/SATPOL.PP tanggal 27 Maret 2025 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2025 terkait Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Arus Mudik Lebaran di Kabupaten Kubu Raya.

**Hasil Kegiatan :**

- a) Kegiatan pada hari Minggu dan Senin tanggal 6-7 April 2025 di Pelabuhan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya untuk memantau arus balik mudik lebaran. Ditemukan banyak masyarakat yang menggunakan transportasi yang melalui air /sungai dan ada yang melewati laut menggunakan motor air/speed boat yang tidak bisa melalui jalan darat.
- b) Dalam 1 hari kurang lebih ada pemberangkatan kapal/motor air 5 sampai 6 kali pemberangkatan dengan 1 kapal kurang lebih terisi penumpang 200 orang lebih dan motor roda 2 kurang lebih 70 kendaraan yang di naikkan di atas kapal.
- c) Demikian pula penumpang pakai speed boat dengan penumpang yang melebihi target /kursi tempat duduk.
- d) Untuk semua tujuan kapal dengan penumpang rata-rata penuh.
  - i. Pada Kegiatan arus mudik balik lebaran di Pelabuhan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.
- e. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi gangguan Trantibum pada Sidang Sengketa Penyelesaian Informasi Publik, berdasarkan :
  - 1) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/194/SATPOL.PP tanggal 10 Februari 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 terkait bertempat di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

### **Hasil Kegiatan :**

- ✓ Sidang Sengketa terkait Permohonan informasi mengenai pembuatan sertifikat kepada BPN oleh bapak samsudin untuk sidang pemeriksaan perkara mengenai tanah yang belum bersertikat hanya memegang surat keterangan tanah
  - ✓ Mengajukan pembuatan sertifikat berdasarkan SKT di BPN Terkendala Surat Keterangan Tanah/surat ukur tanah Yang Tumpang Tindih.
  - ✓ Siapa yang memohon di atas tanah bapak samsudin dan mendapat surat tanggapan dari BPN.
  - ✓ Dan Bapak Samsudin Mendapat Surat Tanggapan Dari BPN Yang Dikirim Menggunakan Jasa Pos Di Antar Kerumah Dan Diterima Oleh Bapak Samsudin.
  - ✓ Pemohon Meminta Informasi Kepada Bpn Mengenai Siapa Pemilik Sertifikat Terdahulu Sehingga Terjadi Surat Tumpang Tindih.
  - ✓ Sampai Sidang Selesai Belum Ada Putusan Menunggu Sidang Lanjutan.
  - ✓ Kegiatan Pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.
- 2) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/311/SATPOL.PP tanggal 27 Februari 2025 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 terkait bertempat di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

### **Hasil Kegiatan :**

- ✓ Penyelesaian Sengketa Informasi Oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Barat.
- ✓ Persidangan Sengketa Informasi sesi pertamaa adalah sidang lanjutan dari perkara sengketa Informasi antara saudara Nurlatifah binti Alwi melawan Kantor ATR/BPN Kota Pontianak siding ini adalah untuk memeriksa *legal standing* dari pemohon kepada pemohon untuk pembuktian mengenai sengketa ha katas tanah yang bersengketa .
- ✓ Pemohon ingin mengetahui kronologis pengalihan hak atas tanah kepada termohon, tetapi termohon tidak dapat memberikan yang dikecualikan

- ✓ Sidang di skors oleh majelis hakim dan dilanjutkan oleh panitera.
  - ✓ Untuk sidang sesi kedua merupakan sidang lanjutan antara pihak pemohon antara arniamewakili PT Nusa Megah Cemerlang melawan Bank Mandiri TBK Cabang 1 Gusti Ngurahrai Pontianak.
  - ✓ Informasi yang disengketakan adalah pemohon ingin mengetahui kronologis kisah hasil pelelangan Aset milik pemohon tidak diberikan dokumen hasil pelelangan oleh termohon ( PT Bank Mandiri ). Jadi pemohon mengajukan gugatan kepada komisi informasi untuk memperoleh informasi tentang dokumen yang tidak diberikan oleh termohon (Bank Mandiri)
  - ✓ Majelis Hakim menskors sidang untuk dilanjutkan ke sidang selanjutnya yang akan dijadwalkan oleh panitera.
  - ✓ Kegiatan Pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.
- f. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi gangguan Trantibum pada Razia Pelajar Yang Berada Di Luar Sekolah Pada Jam Pelajaran berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/77/SATPOL.PP tanggal 17 Januari 2025 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 terkait bertempat di Kota Pontianak.

**Hasil Kegiatan :**

- a) Menintak lanjuti laporan / pengaduan dari masyarakat terkait adanya peserta didik/siswa yang berada di luar sekolah dan menggunakan seragam sekolah selama jam pelajaran sekolah.
- b) Tim melakukan pengawasan / pemantauan di tempat yang di infokan oleh masyarakat ada beberapa anak sekolah yang sedang nongkrong pada wakktu jam pelajaran belangsung
- c) Hasil temuan di lapangan .

- ✓ Tim menemukan 2 siswa dari MAN 1 dan 1 siswi dari SMK Mandiri / peserta didik yang nongkrong di warung-warung di jalan Tanjung raya 2 pemilik warung candra.
  - ✓ Tiga anak tersebut disuruh berjanji untuk tidak mengulangi lagi selama masih jadi pelajar dan membuat pernyataan.
  - ✓ Respon masyarakat sangat mendukung atas Tindakan dari sat pol pp provinsi Kalimantan barat dalam penangkapan anak sekolah yang sedang nongkrong di warung.
- d) Kegiatan razia pelajar yang berada di luar sekolah pada waktu jam sekolah di kota Pontianak tidak ditemukan ancaman potensi gangguan trantibum di kota pontianak.
- g. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum pada Aksi Kenakalan Remaja berdasarkan :
- 1) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/141/SATPOL.PP-B Tanggal 31 Januari 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, 1-2 Februari 2025 bertempat di Kota Pontianak;
  - 2) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/167/SATPOL.PP-B Tanggal 5 Februari 2025 dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Februari 2025 bertempat di Taman Sepeda Untan Kota Pontianak;
  - 3) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/223/SATPOL.PP-B Tanggal 14 Februari 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, 15-16 Februari 2025 bertempat di Kota Pontianak;

**Hasil Kegiatan :**

- a) Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Satpol PP Kota Pontianak dan Masyarakat sekitar terkait maraknya kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat.

- b) Berdasarkan informasi yang diterima dari laporan masyarakat banyaknya masyarakat yang berkumpul (muda mudi) sampai larut malam di sekitar Taman Sepeda Untan dan kurangnya penerangan dapat menyebabkan tindakan asusila.
- c) Tim juga melakukan patroli yang menyusuri jalan Jl. A Yani- Jl. Sutoyo - Jl Purnama 1 - Jl. Purnama 2 - Jl. Nirbaya - Jl. Ampera - Jl. Berdikari pal v - Jl. Nipah Kuning Dalam - Jl. Karet - Jl. Komyos sudarso - Jl. Rahadi Usman - Pasar Kapuas Indah - Pasar Kapuas Besar - Shenghi - Jl. Tanjungpura - Jl. 28 Oktober - Jl. Budi Utomo - Jl. Parit Pangeran - Jl. Panglima Aim - Jl Pemda - Jl. Tani - Jl. Imbon - Jl. Daya Nasional - Kantor Gubernur Kalbar.
- d) Sepanjang rute yang dilewati situasi aman tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Selama kegiatan malam tersebut tidak ditemukan gangguan trantibum sepanjang jalan kota Pontianak yang di lalui tim kewaspadaan dini tersebut.
- e) Kegiatan dalam pemantauan tim kewaspadaan dini tidak ditemukan potensi gangguan trantibum di kota pontianak.

## 2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

### REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	287.972.900,-	54.899.851,-	19,06 %

Sumber data : Nota Pengajuan Dana (NPD)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2025 sebesar Rp. 287.972.900,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 54.899.851,- (lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 19,06 %. Hal ini menunjukkan tingkat realisasi anggaran sesuai dengan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (anggaran kas).

**BAB III**  
**HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN**

**3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Laporan	1 Laporan	25 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi sebanyak 1 (satu) laporan atau sebanyak 25 % (dua puluh lima persen)

Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

### 3.2 Kendala dan Solusi

- a. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi yaitu belum optimal koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat untuk memperoleh data dan informasi peta potensi rawan konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.
- b. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melakukan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan dengan instansi terkait baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, *stakeholder* maupun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

## BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2025, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Pontianak, April 2025

Mengetahui:

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



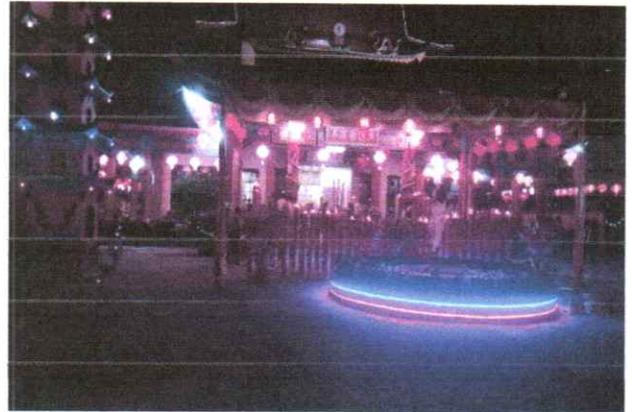
EKA WINDASARI, S.E., M.M.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19820814 200604 2 009

Plt. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini,

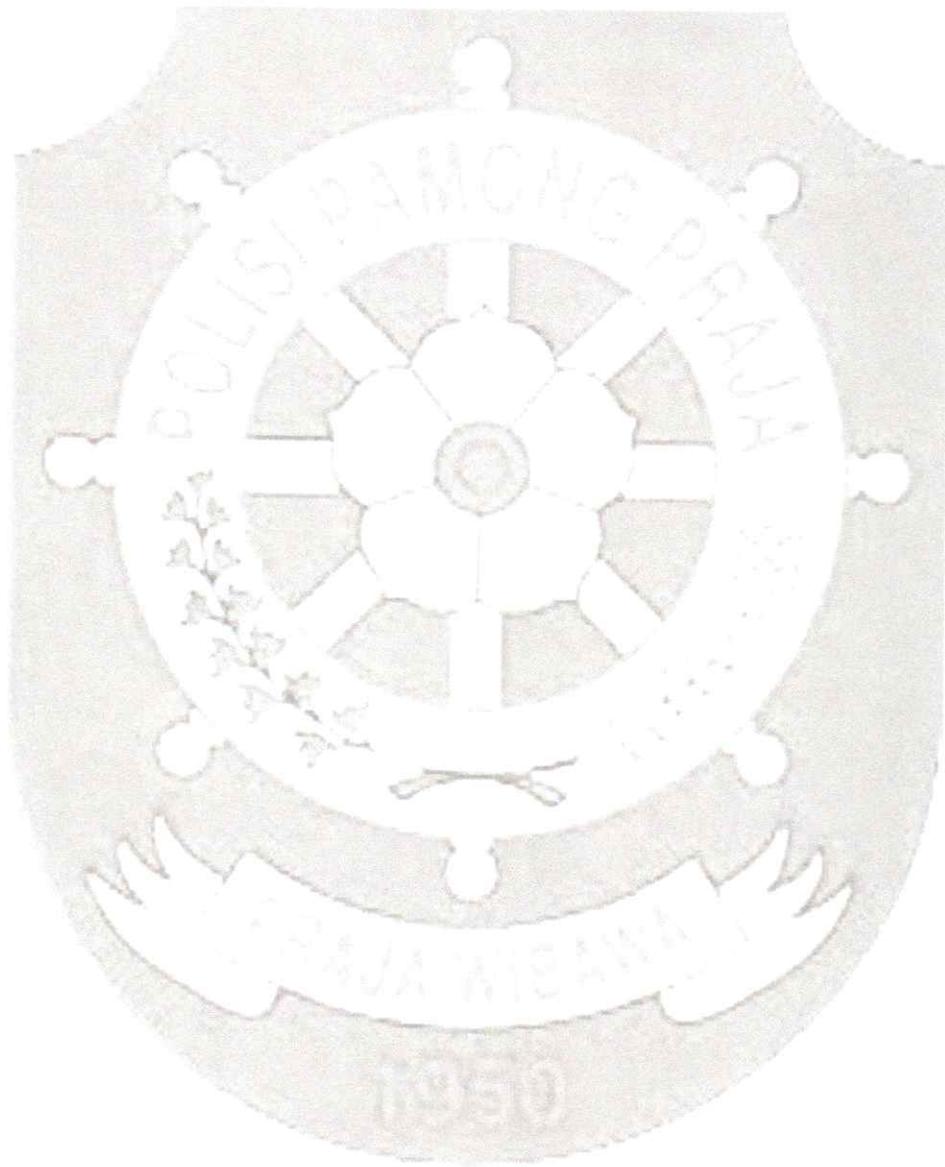


WAHYUDIN NUSA GUNAWAN  
Penata Tk. I  
NIP. 19740425 200701 1 013

## DOKUMENTASI KEGIATAN







**KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
				SATPOL PP	Orang	
1	No. 300.1/1620 /SATPOL.PP-B Tanggal 30 Desember 2024	Rabu, 1 Januari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Malam Pergantian Tahun Baru 2025.	SATPOL PP	7	Kota Pontianak
2	No. 300.1/04 /SATPOL.PP-B Tanggal 2 Januari 2025	Jumat, 3 Januari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pj. Gubernur Kalimantan Barat ( Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti Ke- 79 Tahun 2025 ).	SATPOL PP	7	Halaman Asrama Haji Jalan Sutoyo No. 17 Pontianak
3	No. 300.1/11 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Januari 2025	Sabtu, 4 Januari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.	SATPOL PP	6	Pendopo Gubernur Kalimantan Barat
4	No. 300.1/17 /SATPOL.PP-B Tanggal 6 Januari 2025	Senin, 6 Januari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Demo Aliansi Mahasiswa BEM SI	SATPOL PP	10	DKPR Provinsi Kalimantan Barat
5	No. 300.1/38 /SATPOL.PP-B Tanggal 9 Januari 2025	Kamis, 9 Januari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Penetapan Calon Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.	SATPOL PP	4	Hotel Mercure Pontianak
6	No. 300.1/81 /SATPOL.PP-B Tanggal 17 Januari 2025	Minggu, 19 Januari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hauli Habib Muhammad Bin Abdullah Al Muthahhar Ke- 113.	SATPOL PP	7	Masjid Raya Mujahidin Pontianak
7	No. 300.1/77 /SATPOL.PP-B Tanggal 17 Januari 2025	Senin, 20 Januari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Razia Pelajar Yang Berada Di Luar Sekolah Pada Jam Pelajaran.	SATPOL PP	10	Kota Pontianak
8	No. 300.1/113 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 Januari 2025	Selasa - Rabu, 28 - 29 Januari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Tahun Baru Imlek 2576.	SATPOL PP	4	Kabupaten Kubu Raya
9	No. 300.1/114 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 Januari 2025	Selasa - Rabu, 28 - 29 Januari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Tahun Baru Imlek 2576.	SATPOL PP	4	Kabupaten Mempawah

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
				SATPOL PP	Orang	
10	No. 300.1/141 /SATPOL.PP-B Tanggal 31 Januari 2025	Sabtu - Minggu, 1 - 2 Februari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Terhadap Kenakalan Remaja.	SATPOL PP	9 Orang	Kota Pontianak
11	No. 300.1/155 /SATPOL.PP-B Tanggal 4 Februari 2025	Selasa, 4 Februari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Seminar Kesehatan Hari Kanker Sedunia Tahun 2025.	SATPOL PP	3 Orang	Hotel Golden Tulip Pontianak
12	No. 300.1/167 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Februari 2025	Rabu, 5 Februari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Terhadap Kenakalan Remaja.	SATPOL PP	11 Orang	Taman Sepeda Untan
13	No. 300.1/175 /SATPOL.PP-B Tanggal 6 Februari 2025	Kamis, 6 Februari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pembukaan Event Festival Imlek dan Cap Go Meh Tahun 2025.	SATPOL PP	6 Orang	Kota Pontianak
14	No. 300.1/181 /SATPOL.PP-B Tanggal 7 Februari 2025	Sabtu - Minggu, 8 - 9 Februari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kalbar Food Festival ke-VI Tahun 2025	SATPOL PP	10 Orang	A Yani Mega Mall Pontianak
15	No. 300.1/194 /SATPOL.PP-B Tanggal 10 Februari 2025	Selasa, 11 Februari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	SATPOL PP	3 Orang	Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalimantan Barat
16	No. 300.1/209 /SATPOL.PP-B Tanggal 12 Februari 2025	Rabu, 12 Februari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Parade Naga Bersinar Festival Cap Go Meh 2576 Tahun 2025.	SATPOL PP	10 Orang	Kota Pontianak
17	No. 300.1/223 /SATPOL.PP-B Tanggal 14 Februari 2025	Sabtu - Minggu, 15 - 16 Februari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Terhadap Kenakalan Remaja.	SATPOL PP	10 Orang	Kota Pontianak
18	No. 300.1/252 /SATPOL.PP-B Tanggal 18 Februari 2025	Rabu, 19 Februari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Demo Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas dan Aliansi Mahasiswa BEM SI	SATPOL PP	4 Orang	DPRD Provinsi Kalimantan Barat
19	No. 300.1/266 /SATPOL.PP-B Tanggal 20 Februari 2025	Kamis, 20 Februari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Demo Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak.	SATPOL PP	10 Orang	DPRD Provinsi Kalimantan Barat
20	No. 300.1/271 /SATPOL.PP-B Tanggal 20 Februari 2025	Jumat, 21 Februari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Demo Himpunan Mahasiswa Indonesia Kalimantan Barat.	SATPOL PP	4 Orang	DPRD Provinsi Kalimantan Barat

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
				SATPOL PP	Orang	
21	No. 300.1/ 311 /SATPOL.PP-B Tanggal 27 Februari 2025	Kamis, 27 Februari 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Puublik.	3	Orang	Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalimantan Barat
22	No. 300.1/ 324 /SATPOL.PP-B Tanggal 28 Februari 2025	Sabtu, 1 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Terhadap Kenakalan Remaja.	10	Orang	Kabupaten Kubu Raya
23	No. 300.1/ 325 /SATPOL.PP-B Tanggal 28 Februari 2025	Minggu, 2 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Terpilih	10	Orang	Gedung VIP Bandara Supadio Kabupaten Kubu Raya
24	No. 300.1/ 330 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Maret 2025	Senin, 3 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Terpilih	10	Orang	Kantor Gubernur Kalimantan Barat
25	No. 300.1/ 340 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Maret 2025	Kamis, 6 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Demo Komite Sekolah SMA Negeri 1 Pontianak	10	Orang	Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat
26	No. 300.1/ 363 /SATPOL.PP-B Tanggal 7 Maret 2025	Jumat, 7 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Bulan Ramadhan.	9	Orang	Kota Pontianak
27	No. 300.1/ 362 /SATPOL.PP-B Tanggal 7 Maret 2025	Sabtu - Minggu, 8 - 9 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Terhadap Kenakalan Remaja.	9	Orang	Kabupaten Kubu Raya
28	No. 300.1/ 371 /SATPOL.PP-B Tanggal 10 Maret 2025	Senin, 10 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Penyampaian Aspirasi dan Audiensi Oleh Persatuan Tenaga Kontrak Kalimantan Barat (PTKKB)	9	Orang	Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat
29	No. 300.1/ 378 /SATPOL.PP-B Tanggal 11 Maret 2025	Selasa, 11 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Bulan Ramadhan.	10	Orang	Kota Pontianak
30	No. 300.1/ 385 /SATPOL.PP-B Tanggal 12 Maret 2025	Rabu, 12 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Bulan Ramadhan.	10	Orang	Kota Pontianak
31	No. 300.1/ 394 /SATPOL.PP-B Tanggal 13 Maret 2025	Kamis, 13 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Bulan Ramadhan.	11	Orang	Kota Pontianak

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
				SATPOL PP	11	
32	No. 300.1/395/SATPOL.PP-B Tanggal 13 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Bulan Ramadhan.	SATPOL PP	11	Kota Pontianak
33	No. 300.1/403/SATPOL.PP-B Tanggal 14 Maret 2025	Sabtu - Minggu, 15 - 16 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Terhadap Kenakalan Remaja.	SATPOL PP	12	Kota Pontianak
34	No. 300.1/416/SATPOL.PP-B Tanggal 17 Maret 2025	Senin-Selasa, 17-18 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Bulan Ramadhan.	SATPOL PP	10	Kota Pontianak
35	No. 300.1/431/SATPOL.PP-B Tanggal 19 Maret 2025	Rabu-Kamis, 19-20 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Bulan Ramadhan.	SATPOL PP	10	Kota Pontianak
36	No. 300.1/453/SATPOL.PP-B Tanggal 24 Maret 2025	Senin-Selasa, 24-25 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Bulan Ramadhan.	SATPOL PP	10	Kota Pontianak
37	No. 300.1/457/SATPOL.PP-B Tanggal 24 Maret 2025	Rabu-Kamis, 26-27 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Bulan Ramadhan.	SATPOL PP	10	Kota Pontianak
38	No. 300.1/458/SATPOL.PP-B Tanggal 25 Maret 2025	Jum'at, 28 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Mudik Gratis Khatulistiwa	SATPOL PP	10	Halaman Kantor Gubernur Kalbar
39	No. 300.1/478/SATPOL.PP-B Tanggal 27 Maret 2025	Sabtu, 29 Maret 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Arus Mudik Lebaran di Kabupaten Kubu Raya	SATPOL PP	10	Kabupaten Kubu Raya
40	No. 300.1/479/SATPOL.PP-B Tanggal 27 Maret 2025	Minggu-Selasa, 30 Maret - 1 April 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Kegiatan Malam Takbiran dan Open House Hari Raya Idul Fitri 1446 H	SATPOL PP	8	Kota Pontianak